

Prinsip-Prinsip

**Open  
Ownership**



Versi 1.0



# Ikhtisar

Prinsip Open Ownership (Prinsip OO) menetapkan standar emas untuk pengungkapan kepemilikan manfaat (BO) yang efektif. Prinsip OO dimaksudkan untuk mendukung pemerintah mengimplementasikan reformasi BO dan memandu lembaga internasional, masyarakat sipil, dan pelaku sektor swasta dalam memahami dan menyokong reformasi yang efektif.

Secara keseluruhan terdapat sembilan prinsip yang secara bersama-sama membentuk kerangka kerja bagi penerapan kepemilikan perusahaan yang transparan dan komprehensif demi menghasilkan data yang dapat ditindaklanjuti dan digunakan. Pengungkapan yang efektif membutuhkan data berkualitas tinggi dan andal untuk memaksimalkan kegunaan dan meminimalkan celah hukum.

Prinsip OO didasarkan pada kiprah Open Ownership (OO) di hampir 40 negara dalam menetapkan praktik yang baik bagi data terbuka dan berdasarkan temuan para praktisi dan penelitian akademis. Prinsip OO lebih berfokus pada sifat teknis dari aturan pengungkapan yang efektif daripada faktor politik, sosial, ekonomi, dan budaya eksternal yang diketahui memengaruhi implementasi dan dampak.

Karena bidang kebijakan transparansi kepemilikan manfaat (BOT) terus berkembang, OO akan terus memperbaiki dan memperbarui Prinsip OO agar tetap menjadi standar tinggi yang dapat dicapai dan berdampak.

Prinsip OO saat ini terbuka untuk dikonsultasikan dengan para pemangku kepentingan. Kami akan menerbitkan serangkaian pertanyaan pengarah untuk dikonsultasikan pada Januari 2021, dan menyambut tanggapan, baik secara tertulis maupun langsung, bagi peserta diskusi meja bundar kami. Anda dapat [mendaftarkan minat untuk berpartisipasi dalam konsultasi](#) melalui formulir online kami.<sup>1</sup>

## Prinsip

- Definisi kepemilikan manfaat harus termuat secara jelas dan tegas dalam undang-undang dengan menerapkan ambang batas yang rendah untuk menentukan waktu pengungkapan kepemilikan dan pengendalian
- Data harus mencakup semua jenis badan hukum dan orang pribadi yang relevan seutuhnya
- Pengungkapan kepemilikan manfaat harus mengumpulkan detail secukupnya agar pengguna dapat memahami dan menggunakan data tersebut
- Data harus disusun dalam suatu register pusat
- Data harus dapat diakses oleh publik
- Data harus terstruktur dan dapat dibagi pakai
- Langkah-langkah harus diambil untuk memverifikasi data
- Data harus selalu diperbarui dan catatan historis selalu disimpan
- Harus ada sanksi dan penegakan yang memadai untuk ketidakpatuhan

Informasi dan panduan implementasi Prinsip OO lebih lanjut tersedia di:

[www.openownership.org/principles](http://www.openownership.org/principles)

<sup>1</sup> Gunakan pranala atau salin URL ini: <https://share.hsforms.com/1x4uWadJaTo2DI3wDkLOu7w3upv4>



## Prinsip

# Definisi kepemilikan manfaat harus termuat secara jelas dan tegas dalam undang-undang dengan menerapkan ambang batas yang rendah untuk menentukan waktu pengungkapan kepemilikan dan pengendalian

### Sejalan dengan Prinsip Open Ownership (OO):

- Definisi kepemilikan manfaat (BO) yang tegas dan jelas harus menyatakan bahwa pemilik manfaat harus berupa orang pribadi. Definisi harus mencakup semua bentuk kepemilikan dan pengendalian terkait, dengan penjelasan bahwa kepemilikan dan pengendalian dapat dipegang baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Definisi dalam hukum perundang-undangan utama harus bulat dan utuh, dengan perundang-undangan sekunder tambahan yang merujuk pada definisi tersebut.
- Definisi tersebut harus berupa definisi umum yang mencakup semua komponen BO, ditambah dengan daftar contoh-contoh penggunaan BO secukupnya.
- Ambang batas harus dibuat rendah agar dapat memasukkan semua orang dengan keterkaitan BO dan pengendalian yang relevan ke dalam pengungkapan. Pendekatan berbasis risiko perlu menjadi pertimbangan untuk menetapkan ambang batas yang rendah bagi sektor, industri, atau orang tertentu. Ambang batas yang berlaku bagi kepemilikan oleh PEP harus mendapatkan pertimbangan khusus, dengan menggunakan definisi yang jelas untuk menentukan kriteria PEP.
- Nilai mutlak, bukan kisaran, harus digunakan untuk menentukan kepemilikan atau pengendalian dari seorang pemilik manfaat.

---

Definisi kepemilikan manfaat yang jelas berikut kepastian cakupannya terhadap semua bentuk kepemilikan dan pengendalian yang relevan akan membuat aturan pengungkapan tidak mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin menyalahgunakan sistem.

Penggunaan ambang batas rendah untuk menentukan kepemilikan atau pengendalian akan mengurangi risiko tetap tersembunyinya orang dengan kepemilikan atau pengendalian yang relevan. Jika ambang batas terlalu rendah dapat menguras begitu banyak tenaga atau biaya tanpa memberikan wawasan yang bermanfaat tentang kepemilikan atau pengendalian yang signifikan, ambang batas yang terlalu tinggi justru dapat menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan.



Ambang batas yang berlaku bagi PEP dengan keterkaitan kepemilikan atau pengendalian harus mendapatkan pertimbangan khusus. Jaminan ambang batas rendah dapat diberikan kepada PEP yang akan diungkap sebagai pemilik manfaat berdasarkan peningkatan risiko korupsi yang menyertainya.

Upaya mencari nilai mutlak, bukan kisaran, ketika mengungkapkan persentase kepemilikan atau pengendalian akan membantu pengguna dalam memahami pola penggunaan kepemilikan atau pengendalian. Hal ini utamanya penting ketika kepemilikan atau pengendalian dipegang secara tidak langsung. Jika memungkinkan, definisi harus selaras baik di tingkat regional maupun internasional, atau standar minimum yang serupa harus digunakan.

### **Baca selengkapnya**

- [Kepemilikan Manfaat di dalam Undang-Undang: Definisi & Ambang Batas](#)



## Prinsip

# Data harus mencakup semua jenis badan hukum dan orang pribadi yang relevan seutuhnya

### Sejalan dengan Prinsip OO:

- Semua badan hukum dan penetapan yang relevan, dan semua orang pribadi (yakni, orang-orang) yang relevan harus tercantum dalam pengungkapan.
- Setiap pembebasan dari persyaratan pengungkapan harus didefinisikan dengan jelas dan mendapatkan justifikasi serta dievaluasi kembali secara terus-menerus. Informasi tentang dasar pembebasan harus dikumpulkan, atau kepemilikan atas entitas semacam itu harus dikumpulkan di tempat lain dengan tingkat kualitas dan akses yang sebanding (misalnya untuk perusahaan yang terdaftar secara publik (PLC)).
- Aturan perisai yang membolehkan orang pribadi tertentu dengan risiko tinggi (misalnya kekerasan rumah tangga atau penculikan) untuk membatasi pengungkapan informasi tertentu harus diberlakukan dengan kadar yang proporsional dan dibenarkan secara hukum.
- Perhatian khusus harus diberikan pada persyaratan pengungkapan yang berkaitan dengan kategori perusahaan khusus, meliputi badan usaha milik negara (BUMN) dan PLC yang tercatat di bursa dengan persyaratan pengungkapan yang tidak memadai.

Pencantuman jenis entitas yang berbeda-beda secara menyeluruh itu penting karena jika jenis badan hukum dan penetapan tertentu tidak ikut tercantum, celah hukum akan muncul yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang melanggar hukum. Demikian pula, persyaratan pengungkapan harus mencakup semua kategori orang pribadi (misalnya warga negara dalam negeri dan asing yang memenuhi definisi pemilik manfaat) untuk mencegah timbulnya celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pengungkapan kepemilikan.

Aturan pengungkapan harus menjadikan pencantuman semua jenis entitas dan kategori orang sebagai titik awal dan, selanjutnya, menilai entitas serta orang mana saja yang dapat dikecualikan, misalnya berdasarkan risiko, lalu mengumumkan penilaian dan justifikasi tersebut kepada publik.

### Baca selengkapnya

- [Panduan Implementasi: Hukum](#)



## Prinsip

# Pengungkapan kepemilikan manfaat harus mengumpulkan detail secukupnya agar pengguna dapat memahami dan menggunakan data tersebut

### Sejalan dengan Prinsip OO:

- Informasi utama tentang pemilik manfaat, perusahaan pengungkap, dan sarana untuk memegang kepemilikan atau pengendalian harus dicantumkan.
- Penanda yang jelas harus digunakan untuk orang dan perusahaan.
- PEP harus dapat diidentifikasi secara jelas di dalam data.
- Ketika BO dipegang secara tidak langsung melalui beberapa badan hukum, informasi yang memadai harus dipublikasikan untuk memahami rantai kepemilikan secara utuh.

Pengumpulan dan publikasi field kunci pada data tentang pemilik manfaat dan perusahaan pengungkap memudahkan pengguna untuk menafsirkan data secara akurat dan menentukan individual dan perusahaan mana saja yang dirujuk dalam pengungkapan. Pengumpulan dan publikasi sarana dalam memegang kepemilikan atau pengendalian semakin menambah kegunaan data karena memungkinkan pengguna untuk dapat memahami cara kerja kepemilikan manfaat itu. Informasi ini akan penting ketika menyelidiki kasus-kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau korupsi.

Penanda yang jelas (seperti nomor registrasi untuk perusahaan dan nomor pokok wajib pajak untuk orang) memungkinkan pencocokan pengungkapan tentang orang atau perusahaan yang sama sekaligus pembedaan orang yang berbeda dengan nama sama atau detail serupa. Kemampuan mencocokkan dan membedakan (disambiguasi) ini penting; misalnya, ketika entitas menjiplak nama perusahaan terkemuka agar dapat mengaburkan kepemilikan dalam proses uji tuntas. Pengguna data harus dibekali dengan informasi yang memadai agar dapat melakukan pencocokan dan pembedaan ini sekaligus mencocokkan informasi tersebut dengan kumpulan data yang lain.

Untuk memperkuat kegunaan transparansi kepemilikan manfaat sebagai alat bantu antikorupsi, PEP harus teridentifikasi secara jelas karena mereka memegang posisi atau memiliki hubungan yang dapat disalahgunakan untuk tujuan tindak pidana pencucian dana haram, korupsi, atau suap sehingga dengan demikian ada risiko tinggi yang menyertainya.

Jika kepemilikan atau pengendalian dipegang secara tidak langsung melalui beberapa entitas, rantai kepemilikan harus terlihat penuh agar dapat menggabungkan data kepemilikan manfaat dari berbagai sumber. Pengaitan data lintas negara sangat penting untuk mewujudkan seluruh potensinya dalam mengungkap jaringan aliran keuangan ilegal dan mendukung uji tuntas yang solid dan efisien dalam perekonomian global.

### Baca selengkapnya

- [Contoh Formulir untuk Mengumpulkan Data Kepemilikan Manfaat](#)



## Prinsip

# Data harus disusun dalam suatu register pusat

### Sejalan dengan Prinsip OO:

- Pengungkapan BO harus disusun dan dijalankan di register pusat.

---

Keberadaan register kepemilikan manfaat terpusat mengandung arti bahwa orang dan pihak berwenang dapat mengakses informasi tentang kepemilikan manfaat atas perusahaan melalui satu lokasi pusat dengan format terstandar. Inilah prasyarat bagi penggunaan data kepemilikan manfaat yang efektif oleh semua grup pengguna karena sebagian hambatan praktis dan kendala biaya dalam mengakses dan menganalisis informasi kepemilikan manfaat dapat dihilangkan.

Pemeliharaan register pusat kepemilikan manfaat merupakan salah satu dari tiga pendekatan pelengkap yang diidentifikasi sebagai praktik terbaik oleh Kelompok Kerja Aksi Keuangan global (FATF). Analisis mengenai evaluasi negara FATF secara jelas menunjukkan pentingnya register pusat untuk mengurangi risiko tindak pidana pencucian uang; negara-negara yang memiliki register pusat – alih-alih mengandalkan pendekatan terdesentralisasi lainnya di mana data kepemilikan manfaatnya dipegang perusahaan dan lembaga lain – mencatat kinerja yang lebih baik berdasarkan persyaratan FATF dalam menjamin akses tepat waktu ke informasi yang memadai, akurat, dan paling mutakhir tentang kepemilikan manfaat atas perusahaan.



## Prinsip

# Data harus dapat diakses oleh publik

### Sejalan dengan Prinsip OO:

- Publik harus dapat mengakses data BO.
- Data harus dapat diakses dan digunakan tanpa hambatan seperti pembayaran, identifikasi, persyaratan registrasi, pengumpulan data tentang pengguna register, atau pemberian lisensi terbatas, dan dapat dicari oleh perusahaan dan pemilik manfaat.
- Informasi yang dipublikasikan harus memadai agar pengguna dapat memahami dan menggunakan data untuk mencapai tujuan kebijakan dengan tetap menghormati undang-undang privasi yang relevan.
- Jika informasi tentang kelas orang tertentu (misalnya, anak-anak di bawah umur) terbebas dari publikasi, definisi dan justifikasi pembebasan tersebut harus jelas.
- Jika sistem pengungkapan memperbolehkan pembebasan dari publikasi secara kasus per kasus (misalnya untuk meredam risiko terhadap keselamatan pribadi), dasar-dasar pembebasan harus didefinisikan secara jelas, proporsional, dan diterapkan secara adil.
- Jika data sudah dibebaskan dari publikasi, maka data yang tersedia secara publik harus menyatakan bahwa informasi BO dipegang pihak berwenang tetapi telah dibebaskan dari publikasi.

Keberadaan register kepemilikan manfaat publik mengandung arti bahwa para penegak hukum, pelaku bisnis, jurnalis, dan warga dari seluruh dunia dapat mengakses dengan mudah informasi tentang kepemilikan manfaat oleh perusahaan, dengan mematuhi undang-undang privasi yang relevan. Kebolehan penggunaan data secara luas oleh pihak ketiga dapat meningkatkan kualitas data, sedangkan peningkatan basis pengguna di luar pihak berwenang akan meningkatkan dampak. Sebagai contoh, data kepemilikan manfaat yang tersedia secara publik dapat mengurangi biaya dan kerumitan proses uji tuntas dan manajemen risiko bagi sektor swasta sehingga menyamaratakan medan persaingan dan meningkatkan daya saing. Bukti menunjukkan bahwa data di dalam register publik digunakan secara jauh lebih luas ketika tersedia tanpa kendala seperti registrasi, pembayaran, atau identifikasi. Hal ini utamanya penting untuk memudahkan pengguna internasional dalam mengakses data, misalnya ketika melacak rantai lintas negara antar perusahaan.

Pengungkapan dan publikasi informasi kepemilikan manfaat memiliki tujuan keterkaitan publik yang sah dan dapat mematuhi perlindungan data dan undang-undang privasi. Hal ini dapat dilihat dari mekanisme kerja sistem kepemilikan manfaat saat ini di tingkat global dan juga dari analisis terhadap alasan dan risiko publikasi data tentang orang yang merupakan pemilik manfaat. Dalam praktiknya, hal ini berarti bahwa field (bidang) data yang dikumpulkan dan dipublikasikan, (termasuk penanda), harus dikembangkan dalam konteks perundang-undangan lokal dengan tetap memaksimalkan ketersediaan informasi yang menyokong penggunaan data yang efektif.

### Baca selengkapnya

- [Kasus register kepemilikan manfaat publik](#)
- [Perlindungan dan Privasi Data dalam Pengungkapan Kepemilikan Manfaat](#)





## Prinsip

# Data harus terstruktur dan dapat dibagi pakai

### Sejalan dengan Prinsip OO:

- Data BO harus tersedia sebagai data terstruktur, yang setiap pernyataannya sesuai dengan model atau templat data tertentu.
- Data harus tersedia secara digital, termasuk dalam format yang dapat dibaca mesin.
- Data harus tersedia baik dalam basis per rekor maupun per gabungan.

Kegunaan data kepemilikan manfaat akan meningkat ketika datanya tersedia dalam format terstruktur. Data dengan format terstruktur ini akan mudah dianalisis dan ditautkan dengan kumpulan data lain sehingga makin meningkatkan kegunaan data tersebut untuk mengungkap jaringan lintas negara aliran keuangan ilegal dan mendukung proses uji tuntas yang efektif dan tepat waktu. Ketika terstruktur dan dapat dibagi pakai, data kepemilikan manfaat juga lebih mudah diverifikasi karena lebih besarnya rentang pilihan mekanisme verifikasi yang dapat digunakan. Standar Data Kepemilikan Manfaat (BODS) adalah sebuah templat untuk mempublikasikan data terstruktur tentang kepemilikan manfaat dalam format (JSON) yang dapat dibaca dan dipahami oleh sistem komputer di seluruh dunia.

Beberapa pengungkapan dapat dianalisis bersama-sama ketika data dapat dibaca mesin dan tersedia secara massal. Hal ini memudahkan pengguna seperti Lembaga Intelijen Keuangan (PPATK), bank, dan jurnalis dalam menerapkan ilmu data dan teknik pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola-pola kepemilikan yang mencurigakan atau pemilik manfaat yang muncul dalam kumpulan data keterkaitan yang lain (misalnya, daftar sanksi). Ketika sektor swasta dan masyarakat sipil dapat mengakses data kepemilikan manfaat secara massal, maka bukti menunjukkan bahwa inovasi dapat mendorong pengembangan produk-produk uji tuntas yang baru dan identifikasi kasus-kasus korupsi potensial.

### **Baca selengkapnya**

- [Standar Data Kepemilikan Manfaat](#)



## Prinsip

# Langkah-langkah harus diambil untuk memverifikasi data

### Sejalan dengan Prinsip OO:

- Ketika data dikirimkan, langkah-langkah harus diambil untuk memverifikasi:
  - pemilik manfaat;
  - entitas;
  - hubungan kepemilikan atau pengendalian antara pemilik manfaat dan entitas;
  - orang yang melakukan pengungkapan.
- Langkah ini harus dilakukan dengan satu atau beberapa metode berikut:
  - memastikan nilainya sesuai dengan pola yang diketahui dan dikehendaki;
  - memeriksa silang informasi ke sistem otoritatif yang ada dan register pemerintah lainnya;
  - memeriksa bukti pendukung yang dibandingkan dengan dokumen asli.
- Setelah dikirimkan, data harus diperiksa untuk mengidentifikasi potensi kesalahan, inkonsistensi, dan entri usang dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko seperlunya dan mengharuskan pembaruan data bila dibutuhkan.
- Mekanisme harus diterapkan untuk menampilkan bendera merah, baik dengan meminta entitas yang menangani data BO agar melaporkan ketidaksesuaian maupun dengan mengatur sistem agar dapat mendeteksi pola-pola yang mencurigakan.
- Jenis-jenis kepemilikan yang sulit atau mustahil diverifikasi (misalnya saham atas anjak) harus dilarang.

Untuk memaksimalkan dampak register kepemilikan manfaat, pengguna dan pihak berwenang harus memiliki keyakinan bahwa data yang termuat dalam register secara luas mencerminkan realitas yang sesungguhnya mengenai pemilik atau pengendali perusahaan tertentu. Verifikasi merupakan kombinasi antara pemeriksaan dan proses yang ikut memastikan keakuratan dan kelengkapan data kepemilikan manfaat pada suatu waktu tertentu. Pemeriksaan dapat dilakukan di berbagai tahap dalam sistem pernyataan dengan tujuan menciptakan data yang berkualitas tinggi dan andal agar dapat menumbuhkan keyakinan pada register dan memaksimalkan kegunaan dan dampaknya.

### Baca selengkapnya

- [Verifikasi Data Kepemilikan Manfaat](#)



## Prinsip

# Data harus selalu diperbarui dan catatan historis selalu disimpan

### Sejalan dengan Prinsip OO:

- Registrasi awal dan perubahan susulan terhadap BO harus dikirimkan tepat waktu, dengan pembaruan informasi dilakukan dalam jangka waktu yang singkat dan tertentu setelah terjadinya perubahan.
- Data harus terkonfirmasi benar sekurang-kurangnya setahun sekali.
- Semua perubahan pada BO harus dilaporkan.
- Catatan BO perusahaan yang dapat diaudit harus dibuat dengan memberi tanggal pernyataan dan menyimpan catatan historis, termasuk untuk perusahaan yang tidak aktif dan sudah bubar.

Pemutakhiran data sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan pada keakuratan data kepemilikan manfaat dan efektivitas aturan pengungkapan. Kewajiban pengiriman perubahan pada data kepemilikan atau detail orang pribadi atau entitas hukum secara tepat waktu akan meningkatkan kepercayaan pada kemutakhiran data. Kewajiban ini juga mengurangi risiko kesalahan representasi atas badan hukum selama masa pengiriman yang lama sehingga meningkatkan kepercayaan di kalangan pelaku bisnis.

Kewajiban pembaruan data secara rutin dan keharusan pencakupan semua perubahan yang terjadi sejak pernyataan terakhir dalam pembaruan tersebut akan menutup peluang perusahaan dalam menyamarkan perubahan jangka pendek dalam kepemilikan manfaat. Hal ini menutup celah hukum yang dapat mendorong pelaku kejahatan mengakali pengungkapan semua orang yang memegang kepemilikan manfaat atas perusahaan.

Penting sekali menyimpan informasi historis tentang perusahaan karena hal ini dapat membantu membongkar celah yang tidak langsung terlihat dari informasi saat ini. Sebagai contoh, penyimpanan catatan historis mencegah suatu entitas agar tidak mengaburkan identitasnya dengan mengubah nama sehingga membantu penyelidikan untuk kasus-kasus hukum yang pelik. Penyediaan informasi pendukung, seperti tanggal pembuatan pernyataan kepemilikan manfaat, dapat membantu pengguna lebih lanjut untuk menilai perlu tidaknya mempercayai informasi tersebut dan memberikan bukti “siapa mengetahui apa dan kapan” dalam kasus-kasus seperti penyelidikan terhadap efektif tidaknya pelaksanaan uji tuntas dalam suatu waktu tertentu.



## Prinsip

# Harus ada sanksi dan penegakan yang memadai untuk ketidakpatuhan

### Sejalan dengan Prinsip OO:

- Harus ada sanksi yang efektif, proporsional, disuasif, dan dapat ditegakkan untuk ketidakpatuhan pada persyaratan pengungkapan, termasuk ketiadaan pengiriman, pengiriman terlambat, pengiriman tidak lengkap, atau pengiriman palsu.
- Sanksi yang mencakup pembuat pernyataan, pemilik manfaat, pegawai terdaftar perusahaan, dan perusahaan pembuat pernyataan harus dipertimbangkan.
- Sanksi harus meliputi penalti uang dan bukan uang.
- Badan-badan yang relevan harus diberdayakan dan mendapatkan bantuan sumber daya untuk menerapkan sanksi yang berlaku untuk ketidakpatuhan.

Penerapan sanksi yang memadai dan efektif ikut mendorong kepatuhan pada persyaratan pengungkapan dan meningkatkan kualitas serta kegunaan data. Pencantuman sanksi terhadap pemilik manfaat, pegawai terdaftar perusahaan, dan perusahaan yang membuat pernyataan membantu memastikan agar efek gentar dari sanksi berlaku untuk semua orang dan entitas utama yang terlibat dalam pernyataan. Hal ini membantu melecut kepatuhan dari pemilik manfaat, pegawai terdaftar perusahaan, dan pemangku kepentingan lebih luas yang terlibat dalam penatakelolaan dan manajemen perusahaan.

Sanksi hanya dapat berfungsi sebagai gertakan yang efektif jika diterapkan secara adil dan proporsional. Untuk itu, badan-badan yang relevan membutuhkan amanat undang-undang dan sumber daya yang memadai untuk mengidentifikasi dugaan ketidakpatuhan, menyelidiki sepatutnya, dan mengeluarkan sanksi. Sanksi harus mencakup penalti uang dan bukan uang yang bisa mencakup hak-hak terkait bisnis tertentu, seperti tidak dapat mendaftarkan perusahaan atau tidak dapat menerima dividen dari saham.

### Baca selengkapnya

- Informasi tentang sanksi dapat ditemukan di [Verifikasi Data Kepemilikan Manfaat](#)

# Open Ownership



[openownership.org](https://openownership.org)

 [@openownership](https://twitter.com/openownership)

1 St. Katherine's Way, London E1W 1UN

Desember 2020